

## **Pelatihan Perpajakan dan Membangun Jaringan Usaha Koperasi bagi Anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Tegal**

**Budi Susetyo<sup>1</sup>, Agnes Dwita Susilawati<sup>2</sup>, Yuniarti Herwinarni<sup>3</sup>, Juli Riyanto Tri**

**Wijaya<sup>4</sup>, Sumarno<sup>5</sup>, Mahben Jalil<sup>6</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Budi Susetyo

**E-mail:** [budisusetyo@upstegal.ac.id](mailto:budisusetyo@upstegal.ac.id)

### **Abstrak**

*Fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi dalam menjalankan kegiatannya berlandaskan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Tujuan dalam kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang pelaporan perpajakan dan membangun jaringan usaha koperasi. Upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif koperasi dalam pelaporan perpajakan dan membangun jaringan usaha koperasi. Metode pengabdian ini menggunakan lima tahap, empat tahap diantara yakni pemaparan materi dan satu tahap konsultasi/klinis dalam Manajemen sumber daya manusia (SDM), Keuangan, dan pengembangan usaha (ekonomi). Pelaksanaan program Pelatihan bagi koperasi sebagai anggota DEKOPINDA kota Tegal dalam penguatan administrasi khususnya akuntansi koperasi, pengembangan usaha, dan pelaporan perpajakan bagi koperasi dengan tujuan sesuai pemasukan/pendapatan bagi koperasi. Mereka sangat terbantu dengan adanya diskusi dan sebagian kegiatan koperasi telah dilaksanakan, walaupun dalam administrasi pembukuan masih secara sangat sederhana.*

**Kata kunci** – pelatihan, perpajakan, koperasi, dekopinda, tegal

### **Abstract**

*The function and role of cooperatives are to build and develop the potential and economic capabilities of members in particular and the community in general to improve their economic and social welfare. Cooperatives in carrying out their activities are based on the principles of people's economic movements based on the principles of family and mutual cooperation. The purpose of this community service activity is to provide knowledge about tax reporting and build cooperative business networks. Efforts to strengthen and increase the capacity, role and initiative of cooperatives in tax reporting and building cooperative business networks. This community service method uses five stages, four stages of which are material presentation and one consultation/clinical stage in Human Resource Management (HR), Finance, and business development (economy). Implementation of the Training program for cooperatives as members of DEKOPINDA Tegal City in strengthening administration, especially cooperative accounting, business development, and tax reporting for cooperatives with the aim of matching income/revenue for cooperatives. They are greatly helped by the discussion and some cooperative activities have been carried out, although in the administration of bookkeeping it is still very simple.*

**Keywords** -training, taxation, cooperatives, dekopinda, tegal

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 4 huruf (a) menyatakan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota serta masyarakat secara luas guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Dalam pelaksanaannya, koperasi berpegang pada prinsip ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip-prinsip koperasi di Indonesia sejalan dengan prinsip koperasi internasional, salah satunya mengenai pembagian keuntungan yang dikenal sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU).

Tujuan dari ketentuan dalam pasal tersebut adalah untuk mendorong peningkatan kualitas hidup, memperkuat perekonomian, serta menumbuhkan semangat berwirausaha di kalangan anggota. Koperasi merupakan kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pembagian SHU dilakukan sesuai dengan tingkat partisipasi masing-masing anggota, sehingga jumlah yang diterima tiap anggota dapat berbeda.

Secara historis, gerakan koperasi muncul di abad ke-20 sebagai hasil dari upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Djazh Dahlan, 1980). Organisasi Boedi Utomo yang berdiri pada 1908 dan Serikat Islam pada 1911 mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gerakan koperasi secara resmi dimulai pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya melalui kongres yang menghasilkan keputusan mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), menetapkan asas gotong royong, serta menjadikan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional.

Koperasi secara kolektif membentuk organisasi untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya dan menjadi wadah penyampaian aspirasi. Salah satu kegiatan utama koperasi adalah memberikan pendidikan perkoperasian seperti yang tercantum dalam Pasal 58 UU No. 25 Tahun 1992, dengan tujuan agar anggota memahami manajemen dan keuangan koperasi serta terlibat aktif dalam pengembangannya.

Pengurus koperasi wajib mempertanggungjawabkan amanahnya kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), khususnya terkait laporan keuangan. Sayangnya, sebagian besar anggota hanya fokus pada jumlah SHU yang diterima, padahal penting bagi mereka untuk memahami proses penyusunan laporan keuangan dan strategi pengembangan usaha koperasi demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan kondisi tersebut, DEKOPINDA Kota Tegal menyelenggarakan pelatihan untuk memajukan koperasi di wilayahnya, agar koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pendidikan koperasi perlu terus dikembangkan agar anggota, khususnya masyarakat ekonomi lemah, dapat membentuk sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang mendukung kemajuan diri dan koperasi secara keseluruhan.

Sistem ekonomi Indonesia terdiri dari kapitalisme, sosialisme, dan sistem campuran. Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi kerakyatan yang dekat dengan sosialisme sebagai reaksi terhadap kegagalan kapitalisme dalam mengatasi pengangguran serta kelangkaan barang, yang mendorong gerakan dari kelompok ekonomi lemah.

Gerakan koperasi pertama kali berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-19. Tokoh-tokohnya antara lain Charles Fourier, Louis Blanc, dan Saint Simon, yang menekankan pentingnya asosiasi produktif dalam mengatasi masalah sosial. Tahun 1844, koperasi Rochdale Equitable Pioneers didirikan di Inggris sebagai solusi permasalahan sosial. Prinsip-prinsip koperasi ini kemudian dibakukan oleh International Cooperative Alliance (ICA) di Paris tahun 1937, mencakup keanggotaan terbuka dan sukarela, pengelolaan demokratis, otonomi, serta pendidikan dan pelatihan.

Di Indonesia, koperasi simpan pinjam pertama kali diprakasai oleh R. Aria Wiraatmadja di Purwokerto pada 16 Desember 1886 melalui lembaga Hulp en Spaarbank. Koperasi ini bertujuan membantu para priyayi dari jeratan lintah darat, dan mendapat dukungan dari pemerintah kolonial. Kegiatan koperasi makin berkembang sejak 1908 dengan munculnya Koperasi Rumah Tangga oleh

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Boedi Oetomo, koperasi pedagang oleh Syarikat Dagang Islam pada 1913, serta koperasi pendidikan ekonomi oleh Studie Club tahun 1927.

Kongres pertama gerakan koperasi Indonesia dilakukan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai pulau. Prinsip koperasi Indonesia yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 sejalan dengan prinsip ICA, yakni: keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian SHU secara adil, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan koperasi, dan kerjasama antar koperasi.

Pada 1968, SOKRI berubah nama menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), yang sesuai Pasal 57 UU No. 25 Tahun 1992 merupakan satu-satunya lembaga gerakan koperasi nasional. DEKOPIN bertugas memperjuangkan visi koperasi, menyalurkan aspirasi anggota, mewakili gerakan koperasi dalam dan luar negeri, serta bermitra dengan pemerintah dalam pengembangan koperasi. Untuk menjangkau seluruh Indonesia, dibentuklah DEKOPIN Wilayah (DEKOPINWIL) di tingkat provinsi dan DEKOPIN Daerah (DEKOPINDA) di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian integral dari DEKOPIN.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan yaitu memberikan pengetahuan mengenai pelaporan perpajakan serta membangun jaringan usaha antar koperasi. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas, peran, dan inisiatif koperasi dalam menghadapi tantangan perpajakan dan memperluas jaringan usaha guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan anggota.

## **METODE**

Pelaksanaan metode pengabdian ini terdiri dari lima tahapan. Tahap pertama diawali dengan penyampaian materi oleh Dr. Mahben Jalil, MM, yang membahas topik “Strategi Pemasaran Produk Perikanan yang Tangguh”. Tujuan dari sesi ini yakni untuk mendorong para pengelola usaha perikanan, khususnya koperasi, agar memahami pentingnya strategi pemasaran dalam mengembangkan usaha dan menjaga keberlangsungan koperasi yang potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Tahap kedua disampaikan oleh Agnes Dwita, SE., M.Kom, yang membawakan materi tentang “Pemasaran Online”. Melalui sesi ini, peserta diajak memahami bagaimana penerapan pemasaran secara digital dapat menjadi solusi menghadapi tantangan global, serta membuka peluang baru dalam pengembangan usaha koperasi yang masih belum optimal.

Tahap ketiga mengangkat tema “Akuntansi Koperasi” yang dijelaskan oleh Budi Susetyo, SE., M.Si., C.Ht. Fokus dari tahap ini adalah pentingnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan terstruktur sebagai indikator kinerja organisasi koperasi. Materi ini juga menekankan penerapan akuntansi koperasi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Tahap keempat, dengan topik “Perlakuan Perpajakan bagi Koperasi”, disampaikan oleh Yuniarti Herwinanrni, SE., MM. Tujuannya agar anggota koperasi memahami ketentuan perpajakan dan mampu menyusun serta melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tahap kelima merupakan sesi konsultasi atau klinis, yang meliputi bidang manajemen sumber daya manusia (SDM), keuangan, serta pengembangan usaha koperasi di sektor ekonomi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelatihan ini dilakukan pada hari Sabtu, 9 November 2024, dengan pembukaan acara Rakerda dan pelatihan secara resmi dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Tegal, Bapak Drg. H. Agus Dwi Sulistyantono, MM. Kegiatan ini diikuti oleh 42 peserta yang terdiri anggota koperasi, dan daftar hadir peserta terlampir. Penutupan acara dilakukan oleh Ketua DEKOPINDA Kota Tegal, Bapak Drs. H. M. Sipon Junaedi, M.Pd.

Selama pelatihan, tim pelaksana menyisihkan waktu untuk menyampaikan materi kepada peserta mengenai pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi, termasuk strategi pemasaran

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

produk perikanan, pemasaran digital, penyusunan laporan keuangan, serta aspek perpajakan dalam koperasi. Pelatihan ini bertempat di Horison Plaza Hotel Tegal yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 2, Tegal.



**Gambar 1.**

Sambutan Dan Pembukaan Rakerda oleh Pj Walikota Tegal

Meskipun kegiatan ini berlangsung hanya satu hari, para peserta memberikan respons yang sangat positif. Antusiasme tersebut tergambar dari pertanyaan yang banyak diberikan oleh anggota koperasi serta diskusi interaktif dengan narasumber, yang menunjukkan kepedulian peserta terhadap permasalahan nyata yang dihadapi oleh koperasi masing-masing.

Pertanyaan yang diajukan peserta cukup beragam, mencakup topik yang selaras dengan materi pelatihan. Beberapa peserta menanyakan tentang strategi pemasaran produk perikanan melalui platform digital, serta bagaimana pengelolaan manajemen yang efektif dalam membangun koperasi. Selain itu, dibahas pula mengenai motivasi dalam mengembangkan usaha koperasi agar menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.



**Gambar 2.**

Pemateri Menyampaikan Materi Tentang Akuntansi Koperasi



**Gambar 3.**  
Peserta Sedang Melakukan Diskusi



**Gambar 4.**  
Peserta Melakukan Tanya Jawab Kepada Narasumber

Peserta juga menyoroti proses pembuatan laporan keuangan koperasi yang harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota selama satu periode (tahunan). Tak ketinggalan, ada pula pertanyaan terkait pelaporan kewajiban perpajakan koperasi, khususnya mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

Usai pelatihan, panitia juga menyediakan layanan pendampingan dan konsultasi lanjutan yang dapat diakses melalui media sosial atau WhatsApp, serta secara langsung di kantor DEKOPINDA Kota Tegal yang beralamat di Jalan Panggung Timur No. 3, Tegal.



**Gambar 5.**  
Peserta Sedang Mengikuti Materi dari Narasumber

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan program pelatihan bagi koperasi anggota DEKOPINDA Kota Tegal difokuskan pada penguatan aspek administrasi, terutama dalam bidang akuntansi koperasi, pengembangan usaha, serta pelaporan perpajakan. Tujuannya adalah untuk membantu koperasi dalam meningkatkan pemasukan dan pendapatan secara optimal. Kegiatan diskusi dalam pelatihan ini dinilai sangat bermanfaat oleh peserta, dan sebagian koperasi telah mulai menerapkan hasil pelatihan dalam operasional mereka. Namun, sistem administrasi dan pencatatan keuangan di sebagian besar koperasi masih bersifat sangat sederhana.

Oleh karena itu, diharapkan koperasi mulai menerapkan sistem pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni menggunakan standar akuntansi koperasi berdasarkan SAK ETAP, serta melakukan pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam pelaksanaan program ini, terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung sekaligus tantangan. Faktor pendukung di antaranya: (1) dukungan dari Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, dan Kota Tegal, dalam membantu pengembangan koperasi dan mendukung kegiatan yang dirancang oleh pengelola, (2) keberadaan pengelola koperasi yang memiliki visi ke depan, dan (3) partisipasi anggota yang telah mengikuti pelatihan dalam aspek pengembangan usaha serta pengelolaan administrasi, akuntansi, dan perpajakan.

Agar penguatan koperasi lebih merata, sangat diperlukan dukungan dari dinas terkait untuk mendorong koperasi yang belum menjadi anggota DEKOPINDA agar bergabung. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas koperasi di wilayah Kota Tegal.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Taufiqullah, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal, Ibu Dr. Dewi Indriasih, SE, MM, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, serta Bapak Drs. HM Sipon Junaedi, M.Pd selaku Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Tegal atas dukungan dan kontribusinya dalam kegiatan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aldrich, H.E., Fiol, C.M. (1994). Fools rush in? The institutional context of industry creation. *Acad. Manage. Rev.* 19, 645–670
- Anora, Pandji (2002) Koperasi, Kewirausahaan dan usaha kecil. *Penyalur Tunggal*. Rineka Cipta. Hlm 23
- Astarani, J. 2014. "Penggunaan Tecnology Acceptance Model dalam Mengetahui Tingkat Penggunaan Informasi Akuntansi pada UKM di Kota Pontianak", Agustus 2014. Vol. 3. No.1. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*.
- Chaniago, Arifin (1983): *Ekonomi dan koperasi*. CV. Rosda Bandung. Hlm 29
- Davis, G.F.dan Cobb, J.A. (2009). *Resource Dependence Theory: Past and Future Research in the Sociology of Organizations*. April 1, 2009.
- Enceng, Enceng; Djohan, Djabaruddin (2014) *Perkoperasian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Hlm 1.10-1.11
- Hage, J., dan Michael Aiken. (1970). *Social Change in Complex Organizations* New York: Random House
- Hamilton, R.T. dan Shergill, G.S. (1992). The Relationship Between Strategy Structure Fit and Financial Performance in New Zealand: Evident of Generality and Validity with Enhanced Control. *Journal of Management Studies*. 29. P. 95-113
- Hans, Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang- undang Koperasi, Direktorat Jendral Koperasi 1980

- Hendar & Kusnadi (2005): Ekonomi Koperasi. Lembaga Penerbit FEUI hlm. 18-23 O'Sullivan, Arthur (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. Hlm 202 ISBN 0-13063085-3 Philip Kotler, 2002. Manajemen Pemasaran, Jilid 2, Prehalindo, Jakarta.
- Philip K, Kevin LK. Manajemen Pemasaran, edisi 13, jilid2, Erlangga.
- Scott.M. and Bruce, V. (1987). Five Stage of Growth in Small Business. Long Range Planning. Vol. 20, No. 3, pp. 45-52.
- Sitio, Arifin (2001). Koperasi: Teori dan Praktek. Erlangga. Hlm 26
- Solihin, Ahmad; Lestari, ETTY Puji (2014) Ekonomi Koperasi. Jakarta: Universitas Terbuka. Hlm 3
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1 September 2007. Penerbit Salemba. Hlm 27